

## KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN REALISASI RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA

### CONTRIBUTION OF TOURISM SECTOR AND REALIZATION OF MASTER PLAN FOR REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT

D M Soeswoyo<sup>1a</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Parawisata Bogor, Jl. Curug Mekar 17 Kota Bogor.

<sup>a</sup>Korespondensi: Dina Mayasari Soeswoyo, E-mail: dinamayasari3@gmail.com

(Diterima: 29-07-2019; Ditelaah: 30-07-2019; Disetujui: 28-08-2019)

#### ABSTRACT

The tourism sector has now become the leading sector of the Indonesian government's work program, even since 2017 it is ranked second as the country's largest foreign exchange earner. However, this has not been balanced by equitable tourism development and has not yet received the attention of the government in the regions. This study discusses the Bogor City tourism sector tax contribution to Regional Original Revenue (PAD) and the Regional Expenditure Budget (APBD) for the period 2012-2017, also explores the realization of the Bogor City Tourism Development Plan (RIPPARDA) 2016-2018. This study was carried out by a combination of simple quantitative and qualitative approaches to get more accurate and in-depth results. Data collection techniques were carried out through documentation studies, in-depth interviews using semi-structured interview guide tools for several key informants by purposive and snowball, completed with data from observations and literature studies. The analysis of this study was carried out using contribution, descriptive, and explanatory analysis techniques. The verification of qualitative data is done by triangulation. The results of this study are that the contribution of the Bogor City tourism sector to PAD for the 2012-2017 period is 24% and the contributions ratio to the APBD is 7.7%. The average APBD. The benefit realized for the Bogor City tourism sector expenditure for the same period is 0.5%. The Bogor City RIPPARDA Program, in 2016-2018, has been realized at 67.2%. The conclusion of this study is that the Bogor City tourism sector from 2012 to 2017 played an important role in supporting Regional Original Income and APBD, made the largest contribution to local taxes in 2017, and the realization of the Bogor City RIPPARDA program for 2016-2018 has not been maximized (67%), due to several constraints including very minimal tourism budget allocation.

*Keywords:* Bogor City Tourism, Tourism Contributions, Bogor City Tourism, RIPPARDA, Regional Original Income, Regional Budget.

#### ABSTRAK

Sektor pariwisata kini menjadi *leading sector* program kerja pemerintah Indonesia, bahkan sejak 2017 sudah menempati peringkat ke-dua sebagai penghasil terbesar devisa negara. Namun hal tersebut belum diimbangi oleh pembangunan kepariwisataan yang merata dan belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah di daerah. Penelitian ini membahas tentang kontribusi pajak sektor pariwisata Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2012-2017, juga menggali realisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) Kota Bogor 2016-2018. Kajian ini dilakukan dengan metode kombinasi pendekatan kuantitatif sederhana dan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mendalam. Teknik pengumpulan

data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam menggunakan alat bantu pedoman wawancara semi terstruktur kepada beberapa informan kunci secara *purposive* dan *snowball*, juga dilengkapi dengan data-data hasil observasi dan studi literatur. Analisis kajian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kontribusi, deskriptif dan eksplanatif. Verifikasi data kualitatif dilakukan secara triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah, kontribusi sektor pariwisata Kota Bogor terhadap PAD periode tahun 2012-2017 adalah 24% dan rasio kontribusi terhadap terhadap APBD adalah 7,7%. Rata-rata manfaat APBD yang direalisasikan untuk belanja sektor pariwisata Kota Bogor periode yang sama adalah 0,5%. Program RIPPARDA Kota Bogor, pada tahun 2016-2018 sudah terealisasi 67,2%. Simpulan dari penelitian ini adalah sektor pariwisata Kota Bogor tahun 2017 memberikan kontribusi terbesar (36%) dalam pajak daerah dan berperan penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah dan A.P.B.D. 2012-2017. Realisasi program RIPPARDA Kota Bogor tahun 2016-2018 belum maksimal (67%), karena beberapa kendala termasuk alokasi anggaran belanja pariwisata yang sangat minim.

Kata kunci: APBD, Kontribusi, Kepariwisata Kota Bogor, RIPPARDA, Pendapatan Asli Daerah.

---

Soeswoyo, D. M. (2019). Kontribusi Sektor Parawisata dan Realisasi Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Kota. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 108-119.

---

## PENDAHULUAN

Menurut (Arief Yahya, 2018), besarnya potensi dan manfaat pariwisata Indonesia turut memacu pemerintah sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu dari lima prioritas pembangunan dalam program Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode pemerintahan 2014-2019, dan bahkan menjadi sektor unggulan peringkat ke-2 pembangunan 2018. Hasilnya cukup menggembirakan karena sejak 2016, industri pariwisata Indonesia telah menempati peringkat kedua sebagai sumber penghasil devisa negara, selanjutnya pada tahun 2019 industri pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi sumber penghasil devisa terbesar dengan target US\$ 20 Miliar. Menurut (Kotler, Bowen & Makens, 2011), pariwisata juga mempunyai banyak manfaat lain, diantaranya: (1) Membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, (2) Sarana pendukung berbagai industri, (3) *Multiplier effect*, (4) Memicu ekspor produk lokal, dan (5) Sumber pajak daerah dan pendapatan Negara.

Upaya pengembangan pariwisata pemerintah pusat perlu didukung pemerintah daerah dalam mengelola potensi wisata di daerahnya sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi optimal baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah yaitu melalui peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap bulan, sektor pariwisata memberikan kontribusi langsung terhadap pajak daerah, yang kemudian menjadi salah satu komponen bagi PAD dan selanjutnya merupakan komponen penting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana APBD ini yang kemudian berperan sebagai sumber dana pemerintah untuk biaya dan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pengembangan daerah termasuk di antaranya sektor pariwisata, pemerintah daerah berperan penting untuk dapat menumbuhkembangkan perekonomian di daerahnya termasuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping meningkatkan tata kelola terhadap berbagai sumber PAD yang sudah ada, pemerintah daerah juga harus kreatif menggali dan memanfaatkan potensi

sumber PAD nya sehingga pendapatan daerah akan semakin bertambah guna membantu biaya pembangunan di daerahnya.

Diutarakan oleh (Widiantono, 2013) dalam (Arif Refiandi, 2016), bahwa industri jasa pariwisata menaungi semua layanan yang termasuk dalam perjalanan wisatawan dari suatu daerah asal ke daerah tujuan wisata, hingga kembali lagi ke tempat asalnya, yang melibatkan berbagai usaha seperti *tour operator*, agen perjalanan, pemandu wisata (*guide*), akomodasi, restoran, *toko cendera mata*, *money-changer*, berbagai jasa transportasi udara, darat, laut, dan lain sebagainya. Menurut Salah (Wahab, 2003), pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian dengan cepat, baik dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan taraf hidup juga mendorong tumbuhnya produktivitas usaha lainnya. (Spillane, 1987) memaparkan bahwa ada tiga aspek kontribusi pariwisata dalam pembangunan negara yaitu aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja), dan aspek kebudayaan (memperkenalkan beragam budaya kepada para wisatawan). Berhasilnya perkembangan sektor pariwisata, secara langsung berpengaruh dalam perannya memberi sumbangsih bagi penerimaan daerah melalui PAD yang kemudian dimanfaatkan untuk biaya pengelolaan dan pembangunan daerah, termasuk diantaranya sektor pariwisata.

Kota Bogor merupakan salah satu kotamadya di kawasan propinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta. Lokasinya yang dekat dengan pusat pemerintahan dan ibu-kota negara membuat Kota Bogor sangat mudah dicapai baik melalui jalan raya biasa maupun melalui jalan bebas hambatan. Bogor dikenal juga sebagai Kota Hujan dimana memiliki rata-rata curah hujan yang tinggi, sehingga terasa sejuk dengan masih banyaknya pohon-pohon hijau yang rindang dan terdapatnya pusat konservasi tumbuhan yang merupakan paru-paru Kota

Bogor yaitu Kebun Raya Bogor. Di sisi Kebun Raya Bogor terdapat Istana Kepresidenan Bogor yang kini dipergunakan Presiden Joko Widodo sebagai tempat tinggal dinas. Disamping memiliki potensi daya tarik wisata alami dan buatan, Kota Bogor juga banyak memiliki daya tarik wisata sejarah budaya, wisata kuliner dan wisata konvensi (MICE) sehingga cukup menarik kunjungan wisatawan ke Kota Bogor, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Bogor.

Thn	WISNUS	WISMAN	Total
2013	3,425,211	167,006	3,592,217
2014	3,769,787	183,807	3,953,594
2015	3,597,733	202,108	3,799,841
2016	5,063,201	246,870	5,310,071
2017	5,822,681	283,901	6,106,582
Ttl	13,725,777	669,239	14,395,054

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bogor, 2018. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui peranan dan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kota Bogor, adalah melalui PAD yang diterima. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2016 lalu mayoritas disumbangkan dari pajak Sektor Kepariwisata dan Jasa, yaitu berasal dari

Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan (Laporan Pertanggung Jawaban Wali Kota Bogor, 2016).

Beragamnya daya tarik wisata yang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai seperti restoran, akomodasi, transportasi berikut aksesibilitasnya, berbagai aktivitas wisata, merupakan aset pariwisata yang penting guna menunjang pengembangan industri pariwisata di Kota Bogor. Pertumbuhan fasilitas pariwisata dan meningkatnya jumlah wisatawan ke kota Bogor, merupakan indikator yang dapat berpengaruh langsung pada kontribusi pariwisata Kota Bogor terhadap penerimaan PAD. Tahun 2015, pertumbuhan usaha pariwisata Kota Bogor khususnya industri hotel mengalami fluktuatif yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap nilai kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kota Bogor. Menurut hasil penelitian sebelumnya, diungkapkan bahwa turunnya kontribusi Pajak Hotel Kota Bogor terhadap PAD pada tahun 2015 terjadi karena adanya ketentuan yang melarang instansi pemerintah menyelenggarakan berbagai acara/seminar di hotel berbintang (Dina M. Soeswoyo, 2018). Sektor pariwisata Kota Bogor turut memberikan kontribusi penting bagi pendapatan daerah. Pada tahun 2017, sektor pariwisata Kota Bogor menyumbang pajak terbesar terhadap pajak daerah, yaitu sebesar 36% (Bapenda, 2018). Namun saat ini pemerintah daerah belum menempatkan sektor pariwisata Kota Bogor sebagai salah satu dalam enam skala prioritas program pembangunan yang menjadi konsentrasi Pemerintah Kota periode 2014-2019 (inilahkoran.com, 2017). Bahkan bagi industri pariwisata khususnya usaha hotel dan restoran, kontribusi ekonomi sektor pariwisata tersebut belum dirasakan optimal manfaatnya (Dina M. Soeswoyo, 2018). Penelitian ini menarik karena dapat memberikan gambaran yang lengkap besarnya kontribusi pajak sektor pariwisata Kota Bogor terhadap penerimaan PAD dan APBD 2012-2017, dan juga untuk

mengetahui gambaran realiasi program pembangunan kepariwisataan Kota Bogor sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan program pembangunan kepariwisataan Kota Bogor selanjutnya, dan memaksimalkan kontribusi pariwisata Kota Bogor terhadap PAD dan APBD.

## MATERI DAN METODE

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah didapat dari sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari: (1) Pajak daerah; merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah; (2) Retribusi Daerah; dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi; (3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah; merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah; merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup diantaranya: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil sewa tanah atau bangunan milik pemerintah daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa PAD dapat dimanfaatkan untuk biaya-biaya penyelenggaraan dan pembangunan daerah termasuk di antaranya untuk pengembangan sektor pariwisata daerah. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi pariwisata daerah dapat berdampak langsung terhadap kontribusi PAD. Begitu pula kuantitas serta kualitas manfaat PAD dapat berdampak langsung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah. Menurut (Samsubar Saleh, 2003), keberhasilan kemandirian pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerahnya, sangat ditentukan oleh besarnya hasil pendapatan daerah. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan otonomi daerah, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah pusat.

### **Pengertian Pariwisata dan Kepariwisata**

Koen Meyers (2009), mengutarakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan wisatawan yang dilakukan dari tempat tinggal asal ke tujuan wisata, dengan maksud hanya untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang, mengetahui berbagai daerah yang belum pernah dikunjungi, serta tujuan lainnya, namun tidak untuk menetap ataupun mencari nafkah. Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata,an,

“Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang

tersebut. Pariwisata merupakan segala macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan wisata yang tujuannya bukan untuk menetap (tinggal) dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya disebut wisatawan. Sedangkan kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata”. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kepariwisataan mencakup semua aspek dan kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata yang dilakukan dan didukung oleh semua *stake holders* baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.

### **Usaha Pariwisata**

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 10, tentang Kepariwisata (2009), yang dimaksud usaha Pariwisata yaitu meliputi berbagai usaha untuk menunjang pariwisata seperti menyelenggarakan jasa pariwisata, usaha pengembangan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Usaha pariwisata digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu: (1) Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran (MICE); jasa konsultasi pariwisata, dan jasa informasi pariwisata; (2) Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata baik yang bersifat daya tarik alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus; (3) Usaha Sarana Pariwisata seperti usaha fasilitas penginapan, usaha restoran dan rumah makan, penyelenggaraan tempat hiburan atau kawasan pariwisata yang merupakan kawasan dengan luas tertentu yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

## **Manfaat Pariwisata**

Industri pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan banyak lapangan kerja, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan pendapatan masyarakat, serta memacu berkembangnya berbagai sektor produktif lainnya. Pariwisata juga mendorong berkembangnya berbagai industri penunjang pariwisata seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi (Salah Wahab, 1975). Berkembangnya pariwisata daerah dapat mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut. Menurut (Soekadijo, 2000), pariwisata dapat memberi manfaat bagi masyarakat lokal, antara lain memungkinkan terjadinya komunikasi dan hubungan antara masyarakat lokal dengan wisatawan dari berbagai daerah dan negara, dengan berbagai perbedaan budaya, keyakinan, politik, dan tingkat perekonomian. Pariwisata dapat menjadi sarana bagi pengenalan kebudayaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Usaha sarana pariwisata seperti penginapan dan restoran merupakan jenis usaha padat karya, yang menyerap banyak sumber daya manusia. Manfaat lain pariwisata adalah menyumbang devisa Negara dari uang belanja wisatawan di negara yang dikunjungi. Menurut (Spillane, 1987) belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya, akan meningkatkan penghasilan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah tujuan pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan menawarkan berbagai produk penunjang pariwisata berikut dengan layanannya, seperti mendirikan tempat makan dan minum, penginapan dan homestay, jasa pramuwisata dan produk kerajinan atau cenderamata. Sektor pariwisata juga memberikan manfaat kepada daerah di antaranya melalui pajak daerah yang berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Minuman Beralkohol. Menurut Badan Pendapatan

Daerah Kota Bogor, kontribusi pajak dari sektor pariwisata Kota Bogor diperoleh dari hasil Pajak Hotel, Pajak Restoran dan juga Pajak Hiburan (Dina M. Soeswoyo, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila sektor pariwisata dikelola dengan baik, akan berpotensi mendatangkan banyak keuntungan bagi suatu daerah, baik manfaat bagi pemerintah daerah, pihak swasta dan juga masyarakatnya.

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata**

Menurut (Badrudin, 2001), penerimaan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan juga penerimaan daerah bukan pajak dapat bersumber dari berbagai industri pariwisata yaitu akomodasi atau penginapan, jasa boga, berbagai usaha wisata (destinasi wisata dengan usaha fasilitasnya), usaha perjalanan wisata dan layanan pramu wisata. Menurutnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita. Beberapa hasil riset terdahulu turut mendukung pendapat tersebut. (Edward W. Memah, 2013) menguraikan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD Kota Manado. Hasil penelitian (Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudiaatmaja, 2014), juga menguraikan hal yang senada dimana terdapat pengaruh secara simultan dan positif dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap PAD. (Dina M. Seswoyo dan Sekti Rahardjo, 2018), mengungkapkan dalam penelitiannya, bahwa Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Kota Bogor memberi pengaruh positif terhadap PAD. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh (A. Kamila, 2016), mengemukakan hal yang agak berbeda dimana variabel sektor pariwisata tidak mampu memberikan peranan yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten/ Kota Eks Karesidenan



Surakarta, sedangkan produk domestik regional bruto, tingkat investasi, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD.

### Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang akurat dan lebih mendalam. Pendekatan kuantitatif sederhana dengan perhitungan *Mean* perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran angka-angka yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menggali informasi dan memahami sikap atau pandangan dari para informan penelitian (Ghony dan Almanshur, 2012). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memaknai dari berbagai masalah sosial (Creswell, 2010), serta memberi gambaran yang lengkap tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2009).

### Teknik Pengumpulan Data

Data Primer didapat dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci dengan bantuan panduan wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka, melalui e-mail dan juga aplikasi Whatsapp. Hasil olahan data dokumentasi dari berbagai sumber yaitu Dinas Pariwisata Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bogor, juga dimanfaatkan sebagai data sekunder. Observasi langsung ke beberapa restoran, atraksi wisata dan hotel di Kota Bogor juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap guna mendukung hasil penelitian ini. Informan penelitian dipilih secara *purposive* dan teknik bola salju guna mendapat hasil yang diperlukan.

Subjek Penelitian ini adalah para *stakeholders* pariwisata Kota Bogor yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Kota Bogor dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Bogor yang membidangi Pariwisata.

### Teknik Olah dan Analisis Data

Data-data hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi diolah dan dianalisis untuk menyederhanakan dan melengkapi data-data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Berdasarkan bukti-bukti empiris, data-data diolah dan diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, direduksi, ditabulasikan, dianalisis, diklarifikasikan, digambarkan dan dipaparkan secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio kontribusi, deskriptif dan eksplanatif yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai hal untuk menjawab rumusan masalah. Untuk verifikasi data kualitatif, digunakan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2012-2017

Kontribusi sektor pariwisata Kota Bogor didapat dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Kontribusi pajak sektor pariwisata di tahun 2017 adalah yang terbesar dalam menyumbang Pajak Daerah yaitu sebesar 36%, sebagaimana diungkapkan Bapenda dalam Workshop Pariwisata Kota Bogor tahun 2018. Berdasarkan paparan dalam materi sebelumnya, Pajak Daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi pajak dari sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bogor, dari tahun 2012 hingga 2017 setiap tahunnya meningkat walaupun bila dilihat dari prosentasinya mengalami peningkatan yang fluktuatif. Rata-rata kontribusi tahunan sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bogor kurun waktu 2012-2017 adalah 23,8%. Nilai kontribusi terbesar pajak sektor pariwisata

terhadap PAD yaitu pada tahun 2016, sedangkan jumlah kenaikan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2015. Hal tersebut terjadi karena di tahun 2015 terjadi penurunan pendapatan industri hotel, dampak dari adanya ketentuan yang melarang perusahaan pemerintah menyelenggarakan rapat atau acara di hotel berbintang sehingga berpengaruh langsung

terhadap kontribusi pajak (Dina Mayasari, 2018).

Tabel 3 berikut menguraikan jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bogor, yang didapat dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata Terhadap PAD, 2012-2017

Thn	Pajak Pariwisata	Pertumbuhan	PAD	Kontribusi (%)
2012	80.746.878.495	-	300.932.470.210	26,83
2013	107.539.226.957	33,18	464.695.880,485	23,14
2014	132.069.964.887	22,81	544.835,708,254	24,24
2015	143.810.746.945	8,89	627,597,050,141	22,91
2016	190.714.901.770	32,61	783,873,587,219	24,32
2017	208.766.260.000	8,65	978.197.741.947	21,34
			Mean	23,8

**Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Bogor terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Realisasi Anggaran Belanja APBD untuk Sektor Pariwisata**

Dalam paparan materi sebelumnya, disampaikan bahwa PAD merupakan komponen penting dalam menunjang pemasukan APBD Kota Bogor. Data dari Tabel 4 berikut menunjukan bahwa rata-rata kontribusi sektor pariwisata Kota Bogor terhadap APBD untuk periode tahun 2012-2017 adalah 7,7 %. Kontribusi tertinggi sektor pariwisata Kota Bogor terhadap APBD untuk periode tersebut adalah di tahun 2017 dengan nilai

kontribusi mencapai 9,12 %. Untuk periode yang sama, rata-rata manfaat anggaran APBD yang direalisasikan untuk belanja sektor pariwisata Kota Bogor setiap tahunnya adalah 0,5 %. Realisasi anggaran belanja sektor pariwisata terbesar dari APBD terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,56 % dan terkecil pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,36%. Realisasi anggaran belanja sektor pariwisata Kota Bogor saat ini baru mencukupi keseluruhan belanja operasional dan juga belanja modal sebagaimana dituturkan oleh Shahlan Rasyidi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor (Dina M.Soewoyo, 2018).

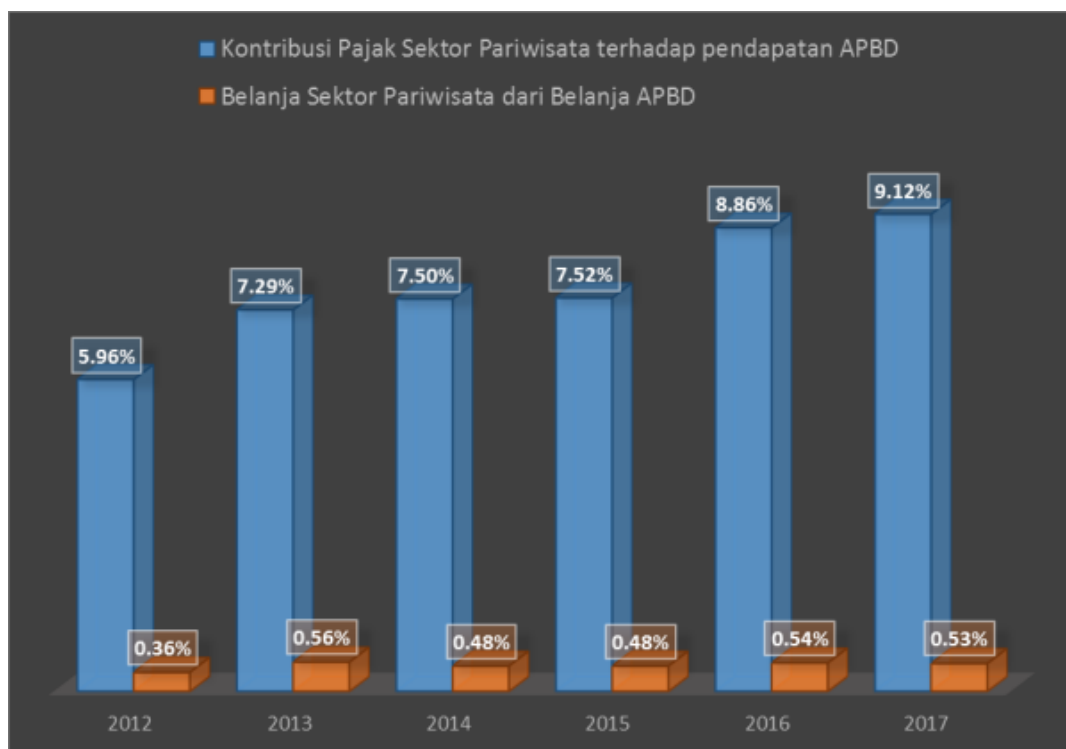


Tabel 4. Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Bogor terhadap APBD 2012-2017 dan Persentase Anggaran APBD untuk Pariwisata.

Thn	Kontribusi Pajak Pariwisata	Pendapatan APBD	%	Anggaran Pari Wisata	Belanja APBD	%
2012	80.746.878.495	1.356.529.980.355	5,96	4.462.446.194	1.256.205.808.990	0,36
2013	107.539.226.957	1.474.372.008.958	7,29	7.915.295.774	1.422.132.371.106	0,56
2014	132.069.964.887	1.757.697.381.840	7,5	8.249.587.757	1.702.962.476.448	0,48
2015	143.810.746.945	1.913.210.404.036	7,52	8.881.870.485	1.862.982.871.234	0,48
2016	190.714.901.770	2.152.370.082.886	8,86	11.527.303.950	2.115.296.888.270	0,54
2017	208.766.260.000	2.289.359.362.675	9,12	11.968.951.827	2.245.590.002.913	0,53
<b>2012-2017</b>		<b>Mean</b>	<b>7.7</b>			<b>0.49</b>

Perbandingan besarnya kontribusi pajak realisasi manfaat APBD bagi anggaran sektor pariwisata terhadap APBD dan belanja sektor pariwisata terlihat jelas :

Gambar 4. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD dan Realisasi Anggaran Belanja Sektor Pariwisata Kota Bogor, 2012-2017



**Manfaat APBD untuk Realisasi Program Pembangunan Kepariwisata Kota Bogor 2016-2018 Sesuai RIPPARDA**

RIPPARDA Kota Bogor 2016-2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016, merupakan pedoman utama arah pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan kebijakan, strategi dan berbagai program yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, serta tujuan

pengembangan kepariwisataan untuk jangka waktu 10 tahun. RIPPARDA seperti juga RIPPARNAS mempunyai empat (4) lingkup pembangunan kepariwisataan yaitu Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata. Tabel 5 berikut adalah hasil yang menunjukkan program pengembangan pariwisata sesuai RIPPARDA Kota Bogor, baik yang belum terealisasi, sebagian terealisasi dan yang sudah terealisasi :

Tabel 5. Rekapitulasi Realisasi Program Pembangunan Pariwisata Kota Bogor Sesuai RIPPARDA, Periode 2016-2018.

Program Pembangunan	BR	%	SR	%	R	%	TTL	%
Destinasi Pariwisata	4	22	7	31	7	31	18	100
Industri Pariwisata	2	15	2	15	9	70	13	100
Pemasaran Pariwisata	1	6	3	18	13	76	17	100
Kelembagaan Kepariwisata	2	11	1	5	16	84	19	100
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>13,4</b>	<b>13</b>	<b>19,4</b>	<b>45</b>	<b>67,2</b>	<b>67</b>	<b>100</b>

Sumber: Wawancara Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor, 2018 (BR=Belum Realisasi, SR=Sebagian Realisasi, R=Realisasi). Dari hasil rekapitulasi Tabel 6, didapat bahwa program pengembangan pariwisata Kota Bogor yang sudah terealisasi sesuai Rencana Induk Kepariwisata Kota Bogor adalah 67,2 % di tahun 2016-2018. Sisanya yaitu 19,4% adalah baru sebagian terealisasi dan 13,4% belum terealisasi. Lingkup program pengembangan pariwisata yang mayoritas sudah terealisasi adalah pada lingkup Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata (84% terealisasi), kemudian diikuti Lingkup Pemasaran Pariwisata (76%), Lingkup Industri Pariwisata (70%) dan Lingkup Destinasi Wisata (31%). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor,

diungkapkan berbagai faktor yang menjadi kendala dan faktor pendukung bagi realisasi pengembangan pariwisata Kota Bogor sesuai RIPPARDA 2016-2025. Faktor terbatasnya anggaran APBD untuk belanja sektor pariwisata dan kurangnya pemahaman serta dukungan lintas sektoral menjadi kendala utama. Namun diakui juga terjadi kekurangan sumber daya manusia pariwisata dalam lembaga kepariwisataan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Menurutnya, “Saya bersyukur karena ada beberapa perusahaan swasta yang turut membantu melalui program Corporate Social Responsibility sehingga dapat sedikit mengatasi anggaran yang terbatas” (Shahlan Rasyidi, rekaman wawancara 2018). Hal senada juga diakui oleh anggota DPRD Kota Bogor yang membidangi pariwisata dan mengemukakan bahwa dana APBD untuk belanja sektor pariwisata Kota Bogor

memang amat terbatas, hal ini dikarenakan sektor pariwisata Kota Bogor untuk saat ini belum termasuk dalam enam (6) skala prioritas program pembangunan pemerintah daerah (Aditia, rekaman wawancara 2018).

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil dari penelitian ini adalah sektor pariwisata Kota Bogor memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah tahun 2017 yaitu sebesar 37%, sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2012-2017, rata-rata sebesar 24% pertahun. Untuk periode yang sama, rata-rata kontribusi sektor pariwisata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor adalah 7,7 %. Rata-rata manfaat APBD yang dianggarkan untuk belanja sektor pariwisata Kota Bogor periode 2012-2017 adalah 0,5%. Dari realisasi belanja sektor pariwisata 0,5% APBD tersebut, mayoritas dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja modal. Belum semua program RIPPARDA Kota Bogor terealisasi pada tahun 2016-2018. Program pembangunan pariwisata Kota Bogor sesuai RIPPARDA yang sudah terealisasi adalah 67,2%, terealisasi sebagian 19,4% dan 13,4 % belum dapat terealisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sektor pariwisata Kota Bogor memberikan kontribusi terbesar dalam komponen Pajak Daerah dan berkontribusi penting dalam PAD dan APBD namun saat ini pembangunan sektor pariwisata Kota Bogor belum termasuk dalam skala prioritas pembangunan daerah, dengan rata-rata alokasi anggaran 0,5 % dari APBD sehingga program RIPPARDA belum dapat terealisasi maksimal.

Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukannya pemahaman, dukungan, koordinasi dan komitmen dari semua pihak terkait untuk pengembangan pariwisata Kota Bogor, baik dari Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Kota Bogor, Dinas Pariwisata Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, serta

dukungan kerjasama pihak swasta, agar pengembangan kepariwisataan Kota Bogor dapat terwujud secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditia. 2018. Rekaman Wawancara, Bogor : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bapenda Kota Bogor.
- Bapenda Kota Bogor. 2018. Workshop Kepariwisata Kota Bogor Strategi Bersama Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor, 27 Agustus
- Cresswell, John. W. 2010. Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. 2017. Data Kepariwisata Kota Bogor
- Memah E. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado, *Jurnal EMBA*, 1(3): 871-881
- Ghony M.D dan Almanshur F. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media\
- J.J. Spillane. 1987. Pariwisata Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Kotler, Bowen dan Makens. 2011. Marketing for Hospitality and Tourism. Fith Edition. Person Education, Inc. USA
- Koen Meyers. 2009. Pengertian Pariwisata, Diakses Juni 2017, dari <http://assharrefdino.blogspot.com/2013/11/pengertian-pariwisata-menurut-paraahli.html>
- Lahay,Yuno. 2018. Rekaman Wawancara. Bogor : Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
- Peraturan Daerah Kota Bogor No.9. 2016. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
- Prayanti, Ni Luh A Suwendra, I Wayan dan Yudiatmaja F. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.

- e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Volume 2
- Qodarrochman N. 2010. Analisis PAD dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya
- Rasyidi Sahlan. 2018. Rekaman Wawancara, Bogor: Dinas Pariwisata Kota Bogor
- Refiandi A. 2016. Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Penduduk, dan PDRB Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 -2014. Universitas Andalas <http://scholar.unand.ac.id/20226>.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Kepariwisataan. Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- Rudi Badrudin. 2001. Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata. *Kompak*. No.3 Hal. 1-13
- Republik Indonesia. Undang Undang No. 10. 2010. Kepariwisataan. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
- Saleh S. 2003. Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia". Vol. XIV No. 2 Desember 2003. Semarang: Media Ekonomi & Bisnis
- Soekadij R.G. 2000. Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"). Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Soeswoyo Dina M. 2018. Efektivitas dan Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah 2012-2016. *Tourism Scientific Journal* 3/2 : 120-141
- Soeswoyo Dina M. dan Rahardjo S. 2018. Peranan Aspek Ekonomis Pariwisata Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah. National Conference of Creative Industry: Sustainable Tourism Industry for Economic Development. Jakarta, 31-48
- Wahab Salah. 2003. Manajemen Kepariwisataan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Yahya Arief. 2018. Pariwisata Era Digital. Seminar Nasional Pariwisata, Jakarta, 30 Juli, 2018. Indonesia.